

**KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DENGAN PEMERINTAH DALAM  
PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK MEWUJUDKAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK DI PRINGSEWU**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**Vania Christine Silalahi**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRACT

### THE PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY AND LOCAL GOVERNMENT ON A CHILD-FRIENDLY SCHOOL PROGRAM TO ESTABLISH A CHILD- FRIENDLY REGENCY IN PRINGSEWU

By

Vania Christine Silalahi

The level of violence against children in Pringsewu regency is still found in the past two years. It required a special attention from a local civil society called the Child and Society Observer Institute (L-PAMAS) by initiating a Child Friendly School Program. A form of partnership between the local government and civil society is one of the implementation of good governance in regional achievement especially in a Child Friendly School Program.

This research uses descriptive research method with qualitative approach and categorized into mutualistic partnership model proposed by Sulistiyani. Based on the result of the research, the form of partnership included cooperation network among the related parties. They are; Education Agency, Health Department, Environmental Management Agency, Child Protection Institution, Community Deliberation Board, Pekon Representative Agency, Childfund International, Head of Pekon, Community Leaders, Elementary School 2 Karangsari and also Elementary School 3 Panggungrejo.

The researcher recommends that civil society and government maintain the communication in partnership especially in funding search and it is better to make a legality partnership for each party.

Keywords: Partnership, Civil Society, Child Friendly School

## ABSTRAK

### **KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DENGAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI PRINGSEWU**

Oleh

**Vania Christine Silalahi**

Tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pringsewu masih ditemukan dalam kurun dua tahun belakangan ini. Hal ini mendapat perhatian khusus dari *civil society* lokal yang bernama Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) dengan mengupayakan Program Sekolah Ramah Anak. Kemitraan antara pemerintah dengan *civil society* merupakan salah satu konteks *good governance* sebagai pencapaian pembangunan daerah khususnya dalam Program Sekolah Ramah Anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dikategorikan ke dalam model kemitraan mutualistik yang dikemukakan oleh Sulistiyani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bentuk kemitraan ialah dengan bentuk jaringan kerjasama antar masing-masing aktor yang terlibat. Adapun aktor-aktor yang terlibat diantaranya; Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Badan Musyawarah Masyarakat, Badan HIPPUN Pemekonan, *Childfund International*, Kepala Pekon, Tokoh Masyarakat, SD 2 Karangsari dan SD 3 Panggungrejo.

Peneliti menyarankan agar *civil society* dan pemerintah tetap menjalin komunikasi dalam kemitraan terutama dalam pencarian dana dan sebaiknya perlu adanya pembuatan legalitas kemitraan antar masing-masing pihak.

Kata kunci: Kemitraan, *Civil Society*, Sekolah Ramah Anak

**KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DENGAN PEMERINTAH DALAM  
PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK UNTUK MEWUJUDKAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK DI PRINGSEWU**

**Oleh**

**Vania Christine Silalahi**

**Skripsi**  
**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**  
**SARJA ADMINISTRASI NEGARA**  
**Pada**  
**Jurusan Ilmu Administrasi Negara**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2017**

Judul Skripsi : **KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DENGAN  
PEMERINTAH DALAM PROGRAM SEKOLAH  
RAMAH ANAK UNTUK MEWUJUDKAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK DI PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Wania Christine Silalahi**

No. Pokok Mahasiswa : 1316041076

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Rahayu Sulistiyati, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19710122 199512 2 001

**Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.**  
NIP

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19750720 200312 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.** .....

**Sekretaris : Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.** .....

**Penguji Utama : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** .....

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Juli 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.


Bandar Lampung, 4 Juli 2017

Saya membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL

C696DAEF401597327

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
**Vania Christine Silalahi**

NPM. 1316041076

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Vania Christine Silalahi, dilahirkan di Pematangsiantar, pada tanggal 29 Februari 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak J. Silalahi dan Ibu J. Hutauruk.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak RK Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar yang diselesaikan pada tahun 2001, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar RK Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar lulus pada tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama penulis di SMP RK Cinta Rakyat 1 Pematangsiantar diselesaikan pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 penulis berhasil lulus pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA RK. Bintang Timur Pematangsiantar. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi dan dipercaya sebagai Kordinator Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKM Katolik Unila periode 2014 dan berlanjut sebagai Sekretaris Umum UKM Katolik Unila periode 2015 serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cab. B.Lampung dan dipercaya sebagai Presidium Pengembangan Organisasi periode 2015-2016.



Dalam menyelesaikan studinya di Universitas Lampung penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Kecamatan Menggala Desa Bujung Tenuk selama 60 hari, penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena bisa belajar secara langsung dan bisa menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat. Pada bulan September 2016 peneliti mulai menyusun skripsi.

*Kupersembahkan tulisan ini kepada*

*Bapak dan Mama tercinta yang selalu sabar dalam mendidik dan mengarahkan aku menjadi yang terbaik. Adikku tercinta Josua Haposan Rafael Silalahi yang telah memberikan doa dan motivasinya.*

## **MOTTO**

**Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat: “Jangan takut, percaya saja!”  
(Markus 5:36)**

**“Saya adalah pensil kecil di tangan Allah yang sedang menulis, yang mengirim sebuah surat cinta kepada dunia”  
(St. Teresa of Avila)**

*Ad Maiorem Dei Gloriam*  
**-Semua Demi Kemuliaan Allah-  
(St. Ignatius of Loyola)**

*Pro Ecclesia et Patria*  
**-Bagi Gereja dan Tanah Air-**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti, atas kehendak serta kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kemitraan *Civil Society* dengan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya, kepada, Dosen Pembimbing Akademik (PA) Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., Dosen Pembimbing Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si, Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., Dosen Pembahas Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si serta seluruh pihak terkait.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Bandar Lampung, 4 Mei 2017

Vania Christine Silalahi

NPM. 1316041076

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti, atas kehendak serta kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kemitraan *Civil Society* dengan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Pembahas yang telah memberikan bimbingan, pengarahan saran serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini..
3. Bapak Simon Sumanjoyo, S.AN, M.P.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan serta motivasi.
4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan saran serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., selaku dosen pembimbing kedua yang senantiasa memberi masukan, membimbing serta memotivasi penulis.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis ke depannya.
7. Kedua Orang Tuaku, Bapak J. Silalahi dan J. Hutauruk beserta Adik Kesayangan ku Josua Haposan Rafael Silalahi yang selalu memberikan aku dukungan, kasih sayang, dan doa untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis. Segala kerinduan ku, ku berusaha untuk semua ini. Semoga dikemudian hari dapat membahagiakan bapak, mama dan adik ku tercinta.
8. Terimakasih juga buat semua sanak saudara ku. Makasih buat Tulang, Nantulang, Pak Tua, Inang Tua, Namboru, Amangboru, Abang, Kakak dan Adek Sepupu ku yang setia membantu aku dalam proses perkuliahan ku.
9. Seluruh informan, L-PAMAS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, SDN 2 Karang Sari dan SDN 3 Panggungrejo serta Aparat Desa, warga Desa Karang Sari dan Panggungrejo terimakasih atas bantuan, informasi dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Untuk teman-teman “Alasmenara” Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013, terkhusus Wiza Yuli Avio Nanda, Dessy Nindya, Ayu Kartika Sari, Devi Yona Sinaga, Devi Permatasari, Agnes Wahyu, Rico Sinurat, Kessy Elisabeth, Yulia Artha terimakasih telah menjadi teman dari awal perkuliahan dan telah menjadi keluarga, tempat berbagi keluh kesah, tetap semangat ya, serta seluruh teman perjuangan Alasmenara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman KKN Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Kak Emad, Kak Rendy, Kak Idof, Opi, Riska dan Irfa, yang telah menjadi keluarga baru selama dua bulan.

12. Sahabat tercinta Anna Turnip, Listicia Sinaga, Ria Tamba, Dessy Purba, Mayang Siahaan, Kalaiyarma Garingging, terimakasih buat semangat dan persahabatan yang cukup lama dan tidak saling mengkhianati ini,wkwk. Tetap semangat untuk meraih gelar dan masa depan di dunia kerja kita masing-masing ya.
13. Untuk Keluarga Perhimpunan ku PMKRI tercinta Abang, Kakak, Adik ku. Buat Bang Asido, Bang Lintong, Bang Agus, Bang Aji, Mas Bo, Kak Hanny, Kak Yuyun, Kak Yohana, Mba Emil, Igna, Tiar, Kili-Kili, Beni, Rianto, Niko, Rosa, Caca, Ibnu, Soma, Onisa, Jupendi. Terkhusus teruntuk teman seperjuangan ku MABIM XXVIII beserta Kepengurusan PHC PMKRI Cab. B.Lampung St. Ignatius de Loyola Periode 2015/2016: Marya L, Marcella, Paulina, Jestina, Alponso, Krismi, Brento dan semua teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, terimakasih untuk semangat, dorongan, motivasi, saran, teman curhat, kekeluargaan, cinta yang telah kalian berikan untuk penulis dan telah memberikan pelajaran dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan bersama Gereja dan Tanah Air.
14. Untuk UKM Katolik Universitas Lampung, terkhusus pengurus Periode 2014 dan 2015 mulai dari Mas Yogi, Mba Eilin, Mas Panggo, Kak Albet, Ko Dedi, Ve, Hary, Papoy, Atin, Hany, Fifi, Banu, Kak Edit, Dody, Berliana, Angel, Arum, Lian, Indri, Dani, Samuel, Martin, Wilda, Shasa, Yohana, Parlin, Tamaria, Tyas, Elisa dan semua teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, terimakasih untuk semangat, pelajaran yang telah diberikan selama berorganisasi.
15. Untuk KMK FISIP Posma, Theresia, Dela, Arnes, Vinda, Ajeng, Tina, Helen, Silver, Vero, Rizky, Yuvita, Chyta, Denita, Deiska, Cindy, Adel dan semua teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, terimakasih untuk kekocakkan kalian semua kepada penulis, tetaplah bertahan sebagai Keluarga di Fisip.
16. Untuk adik-adik ku tersayang, yang setia mulai dari kalian maba hingga saat ini, yang gak pernah bosan sama cerewet nya aku. Terkhusus buat Dessy, Lely, Lusi, Yohana, Laba, Bangkit. Dan buat teman seangkatan

yang masih bertahan dengan segala kesukaan ku,haha,buat Yolanda, Andi ayok buruan skripsi dan tugas akhir nya. SEMANGAT!

17. Untuk Pasukkan Huru-Hara (PHH) dan Geng Warung Emak Katab; Ito Bul-Bul, Tulang Alek S, Alek M, Ito Moan, Cindot, Chrisan, Yunita, Sanggah, Sintong, Ronny, Emes, Sumurung, Bang Don, Martin P, Wenny, Ito Moan, Ito Mario, Ito Gohi, Fajar, Parasian. Kalian penyemangat sekaligus teman main dimasa galau skripsi penulis, terimakasih,haha.
18. Untuk Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 5 Mei 2017

Vania Christine Silalahi  
NPM. 1316041076



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kemitraan.....	10
1. Unsur-unsur Kemitraan.....	11
2. Prinsip Kemitraan .....	12
3. Pola Kemitraan.....	15
4. Tujuan Kemitraan .....	18
B. <i>Good Governance</i> .....	19
1. Aktor yang berperan dalam <i>good governance</i> .....	21
C. Kerangka Pikir .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Fokus Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	28
1. Jenis Data .....	28
2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Teknik Keabsahan Data .....	34
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Profil Kabupaten Pringsewu .....	37
1. Kondisi Geografis .....	37
2. Pembangunan Daerah .....	37
3. Sosial budaya .....	38

4. Disparitas Wilayah.....	38
5. Jumlah Sekolah di Kabupaten Pringsewu.....	39
6. Gambaran Kondisi Pendidikan Tahun 2012-2016.....	39
B. Profil L-PAMAS .....	45
1. Latar belakang dan Sejarah Berdiri.....	45
2. Visi dan Misi.....	46
3. Legalitas .....	47
4. Sekretariat .....	48
5. Badan Pendiri.....	48
6. Badan Pengurus .....	48
7. Bidang Organisasi .....	48
8. Struktur Organisasi .....	49
9. Program Kerja Jangka Panjang.....	49
C. Gambaran Umum Sekolah Ramah Anak.....	54
1. Prinsip Sekolah Ramah Anak .....	55
2. Tahapan Sekolah Ramah Anak.....	56
3. Landasan Hukum .....	57

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	60
1. Pola kemitraan antar aktor-aktor yang bermitra dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak .....	60
2. Kendala-kendala yang dihadapi antara aktor yang bermitra dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak.....	105
B. Pembahasan.....	108
1. Pola kemitraan antar aktor-aktor yang bermitra dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak .....	108
2. Kendala-kendala yang dihadapi antara aktor yang bermitra dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak.....	117

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	123

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Berpikir .....	26
2. Struktur Organisasi L-PAMAS .....	49
3. Kondisi Sekolah Sebelum dan Setelah SRA .....	63
4. Anak Didik yang Menjadi Dokter Kecil.....	74
5. Bibit Pohon Bambu .....	77
6. Alat Bantu Bor Tanah yang merupakan bantuan dari BPLH .....	78
7. Pemberdayaan Masyarakat Setelah SRA.....	85
8. Tim Monitoring dan Evaluasi dari <i>Internastional Organization</i> <i>Childfund</i> langsung dari Amerika Serikat .....	88
9. Pemberian <i>workshop-workshop</i> kepada guru-guru .....	90
10. Pengajaran kepada anak Mengenai Pembuatan Pupuk Organik.....	91
11. Kondisi Lahan SD 3 Panggungrejo .....	96
12. Pola Kemitraan antar masing-masing Aktor yang terlibat dalam Program Sekolah Ramah Anak .....	97

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kekerasan anak menurut LPA .....	2
2. Jumlah Kekerasan Anak menurut Kapolsek Kabupaten Pringsewu .....	3
3. Daftar Informan .....	29
4. Dokumen Penelitian.....	32
5. Jumlah Sekolah di Kabupaten Pringsewu.....	39
6. Perbandingan APK dan APM.....	41
7. Rasio Pendidikan T.A. 2014/2015.....	43
8. Rasio Pendidikan T.A. 2015/2016.....	43
9. Aktor-aktor yang bermitra dalam Program Sekolah Ramah Anak.....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak.

Cara tersebut bukanlah solusi yang baik karena seperti yang kita tahu bahwa anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selain itu, Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Oleh sebab itu wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat

bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Peristiwa kekerasan anak yang marak terjadi ditunjukkan di berbagai Provinsi di Indonesia, seperti halnya di Provinsi Lampung, bahwa masih ada beberapa Kabupaten ditemukan kasus kekerasan pada anak. Salah satunya Kabupaten Pringsewu. Tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pringsewu masih ditemukan dalam kurun dua tahun belakangan ini. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu bahwa jenis kekerasan yang terjadi ialah kekerasan seksual. Berikut tabel kekerasan yang terjadi:

**Tabel 1 Jumlah kekerasan anak menurut LPA**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan
1.	2014	12 Kasus	Kekerasan Seksual
		1 Kasus	Pembulian
2.	2015	8 Kasus	Kekerasan Seksual
3.	2016	4 Kasus	Kekerasan Seksual

*Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 11 November 2016*

Berdasarkan tabel 1 dijelaskan bahwa masih ada jumlah kekerasan anak yang memang menunjukkan penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2014 terdapat kasus kekerasan seksual pada anak sejumlah dua belas kasus dan kasus pembulian terhadap anak ada satu kasus. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menurun menjadi delapan kasus hingga pada tahun 2016 saat ini ditemukan empat kasus kekerasan seksual.

Jumlah kekerasan anak di Kabupaten Pringsewu pun semakin dikuatkan melalui hasil data penelitian yang diterima peneliti dari Brigpol Sisca Indrian selaku anggota Bareskrim Polisi Sekitar (Polsek) Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa jumlah kekerasan yang terjadi masih banyak dan kebanyakan karena kekerasan seksual. Berikut tabel kekerasan yang terjadi:

**Tabel 2. Jumlah Kekerasan Anak menurut Kapolsek Kabupaten Pringsewu**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan
1.	2015	5 Kasus	Kekerasan Seksual
2.	2016	2 Kasus	Kekerasan Seksual dan Penganiayaan
3.	2017	1 Kasus	Kekerasan Seksual

Sumber: Hasil wawancara tanggal 24 Maret 2017

Berdasarkan tabel 2 pun menjelaskan bahwa jumlah kekerasan anak menunjukkan penurunan selama tiga tahun berturut-turut hingga di awal tahun 2017 ini. Pada tahun 2015 terdapat kasus kekerasan seksual pada anak sejumlah lima kasus, pada tahun 2016 sudah menurun menjadi dua kasus yang terdapat satu kasus penganiayaan dan hingga pada tahun 2017 saat ini ditemukan satu kasus kekerasan seksual.

Dari hasil penelitian jumlah kekerasan berdasarkan dua sumber yang berbeda menjelaskan bahwa tiga tahun sebelumnya menunjukkan masih ada kekerasan anak di Kabupaten yang meskipun jumlahnya setiap tahun semakin menurun. Begitu juga berdasarkan hasil observasi menunjukkan secara kuantitatif jumlah yang didapatkan dari Lembaga Perlindungan Anak dan Polsek Kabupaten Pringsewu mengenai kekerasan anak tidak sebanding dengan jumlah kekerasan

anak yang terjadi di lapangan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengalami kekerasan menganggap sebuah aib dan biasanya dilakukan oleh keluarga dekatnya sendiri. Sebagai daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu yang berkeinginan menjadikan pembangunan daerah nya semakin meningkat dari segala aspek khususnya dalam pemberian pemahaman dampak kekerasan bagi anak. Hal tersebut semakin mendapat perhatian khusus dari sekelompok lembaga masyarakat (*civil society*) yang bergerak di bidang perlindungan anak dan masyarakat, yang disebut Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) Kabupaten Pringsewu. Adapun upaya pencapaian perlindungan anak dari lembaga ini ditunjukkan dengan adanya sebuah Program Sekolah Ramah Anak di dua sekolah dasar di Kabupaten Pringsewu.

Bentuk nyata dalam program sekolah ramah anak yang dilakukan oleh L-PAMAS ini merupakan salah satu wujud nyata dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (*civil society*) sebagai tujuan memusatkan perhatiannya pada segala keperluan dan kebutuhan publik. *Civil society* memiliki posisi dan peran yang aktual dan efektif sebagai paradigma dan format bernegara apabila tercipta sebuah komitmen untuk mengekspresikan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam upaya mewujudkan harapan dan cita-cita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Afsari selaku pimpinan Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) pada tanggal 09 Agustus 2016 mengatakan bahwa “Sekolah Ramah anak merupakan sebuah program kerja lembaga yang bermitra dengan sebuah *International Non-Government*



*Organization*, yang bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghapuskan kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan guru dengan anak, orang dewasa dengan anak, bahkan antara anak dengan anak.”

Program sekolah ramah anak ini menjadi batu loncatan bagi sekolah–sekolah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten layak anak di Pringsewu. Kabupaten/Kota layak anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Indikator umum kabupaten layak anak;

1. Ada Peraturan daerah /Peraturan bupati /Peraturan walikota untuk pemenuhan hak–hak anak berdasarkan konvensi hak anak
2. Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak–hak anak berdasarkan konvensi hak anak
3. Adanya forum anak kabupaten/kota
4. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan kepada anak terlatih konvensi hak anak
5. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur
6. Ketersediaan lembaga pelayanan bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak dan remaja berbasis masyarakat.

(Sumber <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4710> yang diakses tanggal 01 November 2016 pukul 11.20 WIB)

Pencapaian sebuah kabupaten layak anak diperlukan kemitraan peran dari beberapa pihak. Pemerintah dengan segala peran dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Pemerintah merupakan aktor utama dalam memberikan dukungan dan persetujuan serta pengawasan terhadap program kegiatan dan anggaran pelaksanaan kota layak anak. Organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan atau yang dalam hal ini dikatakan *civil society* memiliki peran penting untuk melakukan advokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kabupaten layak anak.

Kemitraan antara pemerintah dengan *civil society* sangat penting dalam pencapaian sekolah ramah anak di Kabupaten Pringsewu karena seperti yang diketahui dalam konteks *good governance* ketiga unsur antara pemerintah, swasta, *civil society* merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam tata pengelolaan negara yang berupaya memenuhi segala aspek pembangunan dan mengacu kepada proses pencapaian dan keputusan dari pelaksanaannya sehingga dapat di pertanggungjawabkan bersama. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, swasta dan *civil society* merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah disepakati berbagai pihak yang bermitra.

Kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra. Menurut Notoadmodjo (2010:240), kemitraan

adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi dalam mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Seperti dalam hal pelaksanaan program sekolah ramah anak yang merupakan upaya pencapaian kabupaten layak anak di Pringsewu ini masih menemukan berbagai kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya. Terutama terkendala dalam mengubah pola pikir masyarakat untuk menerima sebuah sistem yang baru. Oleh karena itu, dalam segala pencapaiannya L-PAMAS tidak bekerja sendiri namun juga bermitra dengan beberapa sekolah dasar negeri di Kabupaten yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten selaku dari pihak pemerintah.

Adapun sekolah yang menjadi mitra kerja L-PAMAS sebagai tempat pengimplementasian sekolah ramah anak di Kabupaten Pringsewu mulai diterapkan di SDN 2 Karang Sari pada bulan September 2012 dan SDN 3 Panggung Rejo pada bulan September 2013. Alasan kedua sekolah ini sebagai pilihan untuk diterapkan sekolah ramah anak karena desa Karang Sari dan desa Panggung Rejo ini merupakan desa binaan oleh L-PAMAS dan hanya kedua sekolah ini mau merespon baik niat dari L-PAMAS tentang rencana program sekolah ramah anak ini.

Bentuk partisipasi dari berbagai pihak mulai dari pihak pemerintahan hingga masyarakat sekitar melalui SD Negeri 2 Karang Sari dengan SD Negeri 3 Panggungrejo menjadi salah satu bentuk keikutsertaan L-PAMAS sebagai masyarakat sipil (*civil society*) dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah proses pembangunan daerah khususnya dalam pencapaian kota

layak anak. Oleh karena itu, pola kemitraan antara dua aktor inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga tujuan *good governance* dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak di Pringsewu dapat dicapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Kemitraan Pemerintah dengan *Civil Society* dalam Program Sekolah Ramah Anak untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola kemitraan antara *civil society* dengan pemerintah dalam program sekolah ramah anak untuk mencapai kota layak anak di Kabupaten Pringsewu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak untuk mencapai kota layak anak di Kabupaten Pringsewu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pola hubungan kemitraan antara *civil society* dengan pemerintah
2. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam Program Sekolah Ramah Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan Administrasi Negara, mengenai kemitraan antar dua elemen dalam pencapaian mewujudkan *good governance*
2. Secara Praktis, penelitian dapat memberikan masukan refrensi mengenai pola kemitraan dan kendala bagi pihak-pihak terkait khususnya bagi pihak pemerintah dan *civil society*

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kemitraan**

Menurut Notoatmodjo (2010:210) kemitraan adalah upaya untuk melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan prinsip dan peranan masing-masing. Untuk mencari definisi yang tepat tentang kemitraan adalah hal yang sangat sulit, karena kemitraan memiliki beragam makna bagi banyak orang bagi banyak organisasi/lembaga, (Mc Gregor & Palmer dalam Kamil 2006:3).

Konsep kemitraan memiliki cakupan yang sangat luas meliputi perilaku, sikap, nilai – nilai dan teknik (Bresnen & Marshal dalam Kamil 2006:4) Kemitraan secara mendasar dapat didefinisikan menurut dua cara yaitu; Pertama, melalui atribut yang sangat melekat pada kemitraan seperti; kepercayaan, saling berbagai visi dan komitmen jangka panjang. Kedua, melalui proses di mana kemitraan dilihat sebagai suatu kata kerja, seperti; membangun pernyataan misi, kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan bersama serta pengorganisasian lokakarya.

Dengan demikian, kemiraan dalam penelitian ini adalah hubungan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan memiliki pola,

memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu lembaga dalam menerapkan manajemen modern. Kemitraan dalam implementasi manajemen modern kesepahaman pengelolaan program, kesepahaman strategi pengembangan program antar lembaga yang bermitra merupakan faktor utama yang pertama kali harus menjadi perhatian. Oleh karenanya diantara lembaga yang bermitra harus ada pelaku utama kegiatan, sebagai lembaga/orang yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan program (kegiatan). Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga/orang itulah yang dimitrakan sebagai wujud kerjasama untuk saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan (*mutualisme*).

### **1. Unsur-unsur Kemitraan**

Kuncoro dalam Herliani (2016:14) memaparkan organisasi yang berkolaborasi dituntut untuk saling memberikan kontribusi, saling berbagi dan saling mendukung. Sedangkan, Lendrum dalam Herliani (2016:14) memaparkan bahwa lingkungan, proses dan sumber daya manusia merupakan tiga elemen penting yang dapat menentukan keberhasilan dan efektivitas kerjasama kemitraan. Dialanjutkan oleh Linton dalam Herliani (2016:14) mengemukakan bahwa sebuah hubungan kemitraan harus didasari atas kepercayaan dan kerjasama.

Dari ketiga pendapat tokoh tersebut semuanya memang unsur penting dalam suatu kemitraan yaitu saling memberikan kontribusi, saling berbagi, saling mendukung, kepercayaan, kerjasama, lingkungan, proses dan sumber daya manusia.

## 2. Prinsip Kemitraan

Menurut Notoatmodjo (2010: 244-245) terdapat tiga prinsip utama dalam sebuah kemitraan, yaitu;

### a. Kesetaraan (*equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, maksudnya adalah bagaimana besar atau kecilnya suatu organisasi yang bermitra harus merasa sama. Oleh sebab itu, dalam kemitraan tidak ada yang mendominasi antara satu dengan yang lain.

### b. Keterbukaan (*transparency*)

Dalam prinsip keterbukaan, sumber daya yang dimiliki, kekuatan ataupun kelebihan maupun kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota harus diketahui oleh anggota yang lain. Hal ini ditujukan bukan untuk menyombongkan ataupun meremehkan *stakeholder* lain, namun untuk lebih memahami satu dengan yang lain sehingga tidak ada rasa saling mencurigai. Dengan adanya keterbukaan, maka akan menimbulkan rasa saling melengkapi dan saling membantu diantara *stakeholder* mitra.

### c. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Menguntungkan bukan selalu diartikan sebagai materi namun lebih kepada non-materi. Saling menguntungkan disini lebih dilihat dari unsur kebersamaan atau kesinergian para *stakeholder* dalam mencapai tujuan bersama.



Selain prinsip-prinsip diatas, dalam membangun jejaring kerja dan kemitraan diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus disepakati bersama agar terjalin kuat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah:

a. Kesamaan Visi-Misi

Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi, serta tujuan organisasi. Kesamaan visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan tersebut.

b. Kepercayaan (*trust*)

Setelah adanya kesamaan visi dan misi maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Kepercayaan adalah modal dasar dalam membangun kemitraan yang sinergis dan mutualis.

c. Saling Menguntungkan

Rasa saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerjasama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan harus saling merasa diuntungkan dengan adanya jalinan kemitraan.

#### d. Efisiensi dan Efektifitas

Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu , biaya dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil, justru sebaliknya malah dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraaan dapat dicapai kesepakatan kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan diharapkan akan menjadi lebih efektif.

#### e. Komunikasi Dialogis

Komunikasi timbal balik dilaksanakan secara dialogis atas dasar saling menghargai satu sama lainnya. Komunikasi dialogis merupakan pondasi dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi dialogis akan terjadi dominasi pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya yang pada akhirnya dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.

#### f. Komitmen yang Kuat

Kemitraan akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama. Dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum prinsip-prinsip dalam kemitraan adalah persamaan, kepercayaan, komitmen yang kuat, dan saling menguntungkan.

### 3. Pola Kemitraan

Adapun pola kemitraan menurut Sulistiyani 2004:130 diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut :

#### 1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

#### 2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-

masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

### 3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Sedangkan kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya adalah (Sulistiyani dalam Melyanti (2014:4)) :

#### 1. *Subordinate union of partnership*

Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

## 2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

## 3. *Linear collaborative of partnership*

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi.

Menurut Notoatmodjo (2010: 253), secara umum model kemitraan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

### a. Model I

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (*networking*) atau *building linkages*. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.

### b. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program

bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

Dari beberapa model kemitraan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model kemitraan dapat dikelompokkan menjadi dua yakni model yang hanya berbentuk jaringan kerja saja dan model kemitraan yang didalamnya sudah ada kerjasama yang solid, bukan hanya satu pihak saja yang bekerja.

#### **4. Tujuan Kemitraan**

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “win-win solution partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampun aspekpek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Sulistiyani (2004:130) tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

### ***B. Good Governance***

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *Governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, pemerintahan. Sementara itu paradigma pengelola paradigma pemerintahan yang berkembang sebelumnya adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Menurut Robert Charlick dalam Santosa (2008:130) *Good Governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Seperti yang disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2008:131), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas dan efisiensi).

Dari penjelasan yang diatas, penulis menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan sebuah proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan segala bentuk penyediaan kebutuhan publik, adapun pihak-pihak yang berperan di dalamnya sehingga menciptakan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien.

Syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar menurut UNDP dalam Istianto (2011:96) meliputi ;

- a. Partisipatoris; setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya)
- b. *Rule of law*; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
- c. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang)
- d. *Responsiveness*; lembaga publik harus merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya)
- e. Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi consensus



f. Persamaan hak; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan

g. Efektivitas dan efisiensi; pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara dll.

h. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

## **1. Aktor yang Berperan dan *Good Governance***

### **a. Pemerintah**

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah oleh Syafrudin dalam Istianto (2011:22) pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, emnciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar–samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata–kata oleh orang–orang yang terbaik dan terbesar.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan fungsi pemerintah antara lain:

1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya pemerintah yang berfungsi sebagai *leader* (pemimpin) dan *educator* (pendidik)

2. Dijiwai oleh semangat yang diperintah artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya
3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator (penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat ) dan dinamisator (penggerak segala bentuk kegiatan masyarakat)
4. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar–samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.
5. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata–kata oleh orang – orang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang dan membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan–peraturan.

**b. Masyarakat Madani (*Civil Society*)**

Di lihat dari bahasa asalnya, *civil society* berasal dari bahasa latin “*civilis societas*” yang mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam konteks lain, kata *civil society* sebenarnya berasal dari kasanasah kosakata latin, yaitu “*civitas dei*” atau “Kota Ilahi” sehingga secara harapiiah kata *civil society* diterjemahkan dengan masyarakat kota. Akar kata *civil* adalah *civilization* , yang berarti beradab sehingga *civil society* sering pula diterjemahkan dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, *civil society* dapat dimaknai sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau *barbarian* atau masyarakat *jahilliyah* (Hadiwijoyo,2012:74).

Menurut Hikam (1999:3) *civil society* didefinisikan sebagai wilayah–wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma–norma atau nilai–nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Untuk mempertegas pandangannya, kemudian Diamond (2003) dalam Hadiwijoyo (2012:81) mengajukan 5 (lima) ciri masyarakat sipil yang dapat dibedakan dari masyarakat politik. Kelima ciri tersebut, yaitu:

1. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan–tujuan publik bukannya tujuan privat
2. Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara atau mendapat posisi dalam Negara; ia tidak berusaha mengendalikan politik secara menyeluruh
3. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralism
4. Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok – kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan yang berbeda pula.

Dengan demikian *civil society* merupakan sistem masyarakat yang hidup dalam pemerintahan demokratis yang hidupnya terorganisir dan memiliki posisi dan peran potensial sebagai paradigma dalam pengembangan sistem penyelenggaraan

negara serta memiliki konsistensi sehingga mewujudkan nilai – nilai kemanusiaan di setiap kehidupan individu dan bersama sesama manusia.

### **c. Swasta**

Sektor swasta merupakan salah satu dari tiga pilar *good governance* selain pemerintah dan *civil society* adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Peran ini leboh besar lagi bila dipahami bahwa dalam persaingan yang menuntut keunggulan daya saing global sekarang pemeran utamanya adalah dunia usaha.

Dengan peran dan posisinya yang semakin kuat menyebabkan swasta menjadi salah satu *power center* yang tawar menawarnya semakin besar. Maju dan mundurnya suatu negara sangat berkolerasi dengan maju dan mundurnya dunia usaha karena semakin besar dan kuatnya dunia usaha (sektor swasta) maka langsung atau tidak langsung sektor swasta telah mengambil bagian yang menentukan dalam penetapan kebijakan–kebijakan publik karena sektor swasta sebagai pendukung kuat lemah nya situasi mutu dan produktivitas usaha dalam pengembangan dan penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran, dan informasi.

Demikianlah kemitraan pemerintahan antara pemerintah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dengan *civil society* sebagai pihak–pihak pemerhati yang tergerak akan segala aspirasi masyarakat tanpa terikat dengan segala pelayanan privat dan bersama dengan sektor swasta sebagai pendukung kuat lemah nya situasi mutu serta produktivitas usaha, pemasaran dan informasi yang mampu menentukan penetapan kebijakan publik. Oleh karena itu pengawasan dan menjaga keseimbangan antara ketiga aktor *good governance* menjadi sangat

penting dan mendesak untuk mencegah penyalahgunaan sehingga terwujud suatu pemerintahan yang *accountable*, transparan dan partisipatif dalam sebuah *good governance*.

### C. Kerangka Pikir

Masalah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pringsewu merupakan suatu penghambat majunya perkembangan sebuah daerah otonomi baru yang dimana berkurangnya arti pendidikan moral bagi kehidupan masyarakat. Selain itu juga, kekerasan terhadap anak ini memiliki dampak negatif bagi mental diri seorang anak dan orang tua.

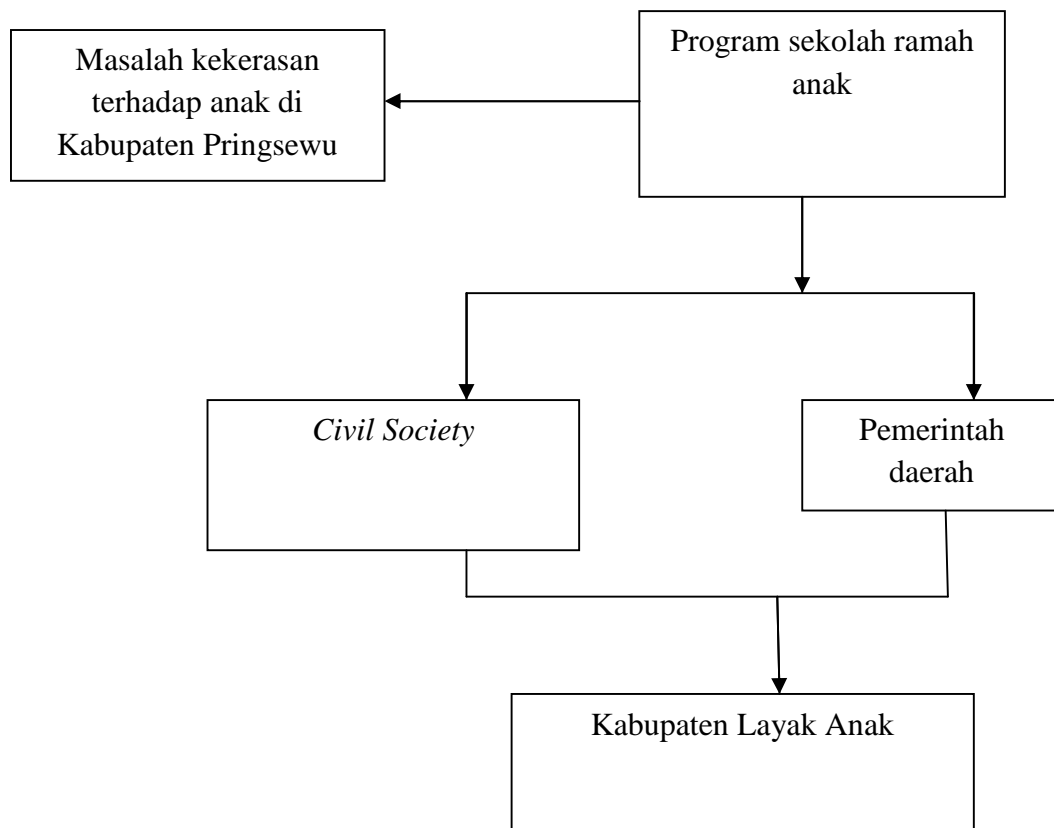
Situasi ini menaruh perhatian bagi salah satu *civil society* yang bergerak di bidang anak Kabupaten Pringsewu. Bentuk wujud nyata keprihatinan *civil society* tersebut melahirkan sebuah program sekolah ramah anak. Program ini menjadi batu loncatan pencapaian pengurangan kekerasan terhadap anak. Program sekolah ramah anak ini diimplementasikan di sekolah karena sekolah merupakan salah satu wadah memfasilitasi seorang anak bertumbuh dan belajar secara teori maupun moral dengan teman sebaya dan lingkungan nya.

Salah satu bentuk upaya agar berjalannya program sekolah ramah ini dengan melibatkan pihak-pihak lain yang dalam hal ini ialah para pemerintah daerah. Dengan kata lain, *civil society* menjalin hubungan kemitraan dengan beberapa pemerintah daerah dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak.

Pelaksanaan program sekolah ramah anak ini masih mendapatkan beberapa kendala–kendala yang dihadapi masing–masing pihak yang terlibat. Penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi kendala–kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan program serta solusi apa yang dapat diberikan dalam keberhasilan kemitraan ini sehingga menciptakan sebuah program untuk mendukung pendidikan yang baik dan tercapainya Kabupaten layak anak di Pringsewu.

**Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir :**



*Sumber : diolah peneliti, 2016*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menekankan proses penelitian daripada hasil penelitian sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tapi pemahaman menyeluruh dan pendiskripsian pola kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, mulai dari pihak pemerintah dengan *civil society* (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam program sekolah ramah anak di Kabupaten Pringsewu.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini menggunakan fokus pada pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran Program Sekolah Ramah Anak di Kecamatan Pringsewu meliputi:

1. Pola hubungan kemitraan aktor-aktor yang terlibat, antara *civil society* dengan pemerintah dalam program sekolah ramah anak untuk mencapai kota layak anak di Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan Pola Kemitraan menurut Sulistyani
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masing – masing aktor, antara *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak untuk mencapai kota layak anak di Kabupaten Pringsewu

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini karena Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten yang mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak dalam penyelesaian kekerasan anak dan disamping itu karena adanya pihak atau masyarakat yang memiliki keprihatinan bagi Kabupaten Pringsewu sendiri.

### **D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2013: 308) dalam mengumpulkan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang *langsung* memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, jenis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni:

##### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian, baik dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan mengenai hubungan kemitraan dalam program sekolah ramah anak.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, literatur, artikel, koran dan sebagainya yang berkenaan dengan program sekolah ramah anak.



## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan penentuan informan ditentukan secara *purposive* dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan pengumpulan datanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu dijelaskan dalam table sebagai berikut :

**Tabel 3 Daftar Informan**

No	Nama Informan	Substansi	Tanggal wawancara
1.	Ahmad Asari S.Pd (Pimpinan Program L-PAMAS)	1.Pola Kemitraan a.Alasan melakukan sekolah ramah anak b.Alasan memilih SD 2 Karang Sari dan SD 3 Panggung rejo sebagai sekolah ramah anak c.mengetahui rekan mitra dalam program sekolah ramah anak 2. Kendala dan Solusi a.Bentuk kendala b.Cara Mengatasi	11 Februari 2017

		Kendala	
2.	Yusufudin (Kordinator Program L-PAMAS)	1.Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi b.Pelaksanaan Program 2. Kendala dan Solusi a.Bentuk kendala b.Cara Mengatasi Kendala	21 Februari  2017
3.	Supriyanto, M.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu)	Pola kemitraan a. Pola kordinasi b. Bantuan yang diberikan atas hasil dari sebuah kemitraan	8 Februari  2017
4.	Novasari,S.Kes (anggota bidang program anak dinas kesehatan kabupaten Pringsewu)	Pola kemitraan a. Pola kordinasi Bantuan yang diberikan atas hasil dari sebuah kemitraan	8 Februari  2017
5.	Lukiati (Kepala Sekolah SD 2 Karang Sari)	1.Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi b.Pelaksanaan Program 2.Kendala dan Solusi a.Bentuk kendala b.Cara Mengatasi Kendala	1 Maret 2017
6.	Sumaryono (Wakil Kepala sekolah SD 3 Panggungrejo)	1.Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi b.Pelaksanaan Program 2.Kendala dan Solusi a.Bentuk kendala b.Cara Mengatasi Kendala	1 Maret 2017
7.	Supriyono (Kepala Pekon Karang Sari)	1.Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi dan kerjasama b.Pelaksanaan Program	27 Maret  2017
8.	Nurahmat (Kepala Pekon Panggungrejo)	1. Pola Kemitraan a. Pola Koordinasi dan kerjasama b.	28Maret  2017

		Pelaksanaan Program	
9.	Rizal Bahrul Mustofa, Amd. Kom (sekretaris umum LPA)	1. Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi b.Pelaksanaan Program 2. Kendala dan Solusi a. Bentuk kendala b. Cara Mengatasi Kendala	1 Maret 2017
10.	Sutarjo (ketua BMM Karang Sari)	1. Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi b.Pelaksanaan Program 2. Kendala dan Solusi a. Bentuk kendala b. Cara Mengatasi Kendala	27 Maret 2017
11.	Sentoso (ketua BHP Panggungrejo)	1. Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi dan kerjasama b.Pelaksanaan Program	28 Maret 2017
12.	Bapak Senam (tokoh masyarakat di desa Karang Sari)	1. Pola Kemitraan a.Pola Koordinasi dan kerjasama b.Pelaksanaan Program	27 Maret 2017

*Sumber: Diolah oleh Peneliti 2017*

1. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Observasi ini mengamati tentang pelaksanaan program sekolah ramah anak terutama bagi pihak-pihak yang bermitra.
2. Dokumentasi, menggunakan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih akurat karena dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang sudah berlalu, bisa berupa dokumen atau data-data tertulis hubungan

kemitraan yang bermitra, foto–foto dokumen tertulis ataupun foto saat wawancara dan observasi.

**Tabel 4.Dokumen Penelitian**

No	Dokumentasi	Substansi
1.	Data Laporan Kekerasan Anak dari Polsek Kabupaten Pringsewu, tahun 2017	Berisi Laporan atau data kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Pringsewu menurut Polisi sekitar
2.	Data Laporan Kekerasan Anak dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA),tahun 2016	Berisi Laporan atau data kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Pringsewu menurut Lembaga Perlindungan Anak
3.	Profil LPAMAS tahun 2016	Berisi sejarah pendirian L-PAMAS, Bidang kegiatan, dan lain-lain
4.	Profil SD 2 Karang Sari tahun 2016	Berisi sejarah pendiriansekolah Bidang kegiatan, dan lain-lain
5.	Profil SD 3 Panggungrejo tahun 2016	Berisi sejarah pendirian sekolah, Bidang kegiatan, dan lain-lain
6.	Profil Dinas Pendidikan tahun 2016	Berisi sejarah pendirian Dinas Pendidikan,Bidang kegiatan, dan lain-lain
7.	Profil Lembaga Perlindungan Anak tahun 2016	Berisi sejarah pendirian Lembaga Perlindungan Anak,Bidang kegiatan, dan lain-lain

*Sumber :Diolah oleh Peneliti, 2017*

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 334-343), teknis analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan dirangkum untuk disesuaikan dengan focus penelitian tentang program sekolah ramah anak di Kabupaten Pringsewu. Dalam tahap ini peneliti memilah data yang dibutuhkan dalam penelitian kemitraan yang dijalankan L-PAMAS dengan beberapa aktor yang terlibat dalam program sekolah ramah anak Kabupaten Pringsewu. Kemudian memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang berhubungan masing-masing kemitraan antar aktor.

### 2. Penyajian Data

Teknik ini untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif serta foto atau gambar sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan.

## **F. Teknik Keabsahan data**

Untuk menetapkan keabsahan data (*Trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Moleong (2004: 175) menyebutkan ada empat kriteria yang digunakan:

### **1. Derajat kepercayaan**

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan proses sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain:

#### **a. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzim dalam Moleong (2004:178) membedakan macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik teori.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data menggunakan triangulasi sumber melalui beberapa wawancara ke masing-masing informan, yakni pihak L-PAMAS, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan, SD 2 Karang Sari, SD 3 Panggungrejo, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan beberapa tokoh dan aparat desa di desa Karang Sari

dan Panggungrejo melalui sumber wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi.

#### b. Kecukupan Referensial

Mengumpulkan bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

### 2. Keteralihan

Orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dan ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Upaya untuk memenuhi hal ini peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan. Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data dalam konteks yang sama antara kemitraan Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SD 2 Karang Sari, SD 3 Panggungrejo dan tokoh serta aparatur di Desa Karang Sari dan Desa Panggungrejo yang terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak.

### 3. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi realibilitas dalam penelitian nonkualitatif. Realibilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji

kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu di uji *dependability*-nya. Maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

#### 4. Kepastian

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian. Derajat ini dapat dicapai melalui audit, atau pemeriksaan yang cermat oleh semua komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan seminar terbuka atau tertutup dengan mengundang teman sejawat dan dosen pembimbing serta dosen pembahas.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Kabupaten Pringsewu**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu diresmikan pada tanggal 3 April 2009 dengan luas wilayah 534,30 km<sup>2</sup> dan terletak pada 104<sup>0</sup> 42<sup>1</sup> 0<sup>11</sup> – 105<sup>0</sup> 8<sup>1</sup> 0<sup>11</sup> Bujur Timur serta 5<sup>0</sup> 8<sup>1</sup> 0<sup>11</sup> - 6<sup>0</sup> 8<sup>1</sup> 0<sup>11</sup> Lintang Selatan dengan batas-batas:

- a. sebelah utara Kabupaten Lampung Tengah,
- b. sebelah selatan dengan Kabupaten Tanggamus
- c. sebelah timur dengan Kabupaten Pesawaran
- d. sebelah barat dengan Kabupaten Tanggamus

##### **2. Pembangunan Daerah**

Potensi utama pembangunan di Kabupaten Pringsewu adalah bidang perkebunan, Peternakan, Perikanan dan industri. Daerah ini merupakan wilayah pembangunan

perkebunan, serta berbagai jenis tanaman perkebunan lain seperti coklat, pisang dan tanaman lainnya. Pengembangan peternakan dan pusat kegiatan perdagangan dari wilayah pembangunan kabupaten dan pengembangan berbagai macam industri. Berkaitan dengan ini, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sangat penting, terutama pengembangan perhubungan darat.

### **3. Sosial Budaya**

Penduduk Kabupaten Pringsewu terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Penduduk Kabupaten Pringsewu mayoritas memeluk Agama Islam (97,76 persen), disusul kemudian Protestan (0,80 persen), Katholik (1,34 persen), Hindu (0,40 persen), Budha (0,24 persen), dan lainnya (0,10 persen).

### **4. Disparitas Wilayah**

Jumlah penduduk yang terus meningkat tersebut mempunyai beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah terjadinya perbandingan yang tinggi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tingginya disparitas tersebut karena terjadinya fokus wilayah pertumbuhan antara daerah yang pertumbuhannya lebih cepat dengan daerah lainnya. Daerah yang pertumbuhan penduduknya lebih cepat seperti daerah sekitar ibukota Kabupaten Pringsewu yaitu kecamatan Pringsewu.

Berdasarkan hasil data tahun 2016, sebanyak 76,9 persen penduduk Pringsewu bertempat tinggal di daerah pedesaan. Ironisnya, jumlah penduduk pedesaan yang lebih banyak tersebut tidak seimbang dengan sarana dan prasarana pembangunan

yang telah dialokasikan. Tidak mengherankan jika jumlah penduduk perdesaan yang lebih besar tersebut biasanya kurang memperoleh kesempatan dibandingkan penduduk kota dalam mengembangkan kehidupannya. Salah satunya karena adanya faktor-faktor penghambat, antara lain tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah, kurang modal dan fasilitas yang belum memadai tersebut.

## 5. Jumlah Sekolah di Kabupaten Pringsewu

Jumlah sekolah sampai tahun 2016 di Kabupaten Pringsewu, di antara nya;

**Tabel 5. Jumlah Sekolah di Kabupaten Pringsewu**

<b>Tingkatan Sekolah</b>	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>
Sekolah Dasar	262	5
Sekolah Menengah Pertama	26	32
Sekolah Menengah Atas	10	11
Sekolah Menengah Kejuruan	3	23
Perguruan Tinggi	1	8

*Sumber:* Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, 2017

## 6. Gambaran Kondisi Pendidikan Tahun 2012-2016

Kondisi pendidikan di Kabupaten Pringsewu selama tahun 2012-2016 dapat digambarkan berdasarkan aspek pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Gambaran kondisi tersebut dapat ditinjau dari berbagai data dan informasi

tentang perkembangan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

**a. Perkembangan APK dan APM**

Dilihat dari perkembangan menurut tahun pelajaran, 2011/2012 dan 2013/2014 APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK mengalami perubahan yang sangat menarik. Pada tahun 2011/2012, dan 2012/2013 mengalami kenaikan dengan adanya jumlah siswa SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/SMK yang meningkat, sehingga terjadinya kenaikan APK SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/SMK, kenaikan APK diikuti juga dengan kenaikan APM.

Dari hasil kegiatan verifikasi, tabulasi dan analisis data pendidikan tersebut di atas diperoleh gambaran perbandingan APK dan APM untuk seluruh satuan dan jenjang pendidikan :

**Tabel 6. Perbandingan APK dan APM**

No	Satuan/ Jenjang Pendidikan	APK				APM			
		2011/ 2012	2012/ 2013	2014/ 2015	2015/ 2016	2011/ 2012	2012/ 2013	2014/ 2015	2015/ 2016
1.	SD/MI/Paket A	117,24	117,50	118,12	118,65	99,25	100,72	101,17	102,28
2.	SMP/MTs/Paket B	98,12	99,24	100,18	101,3	85,16	86,22	87,27	88,21

3.	SMA/MA/SM K	58,23	59,26	60,18	61,26	53,45	53,67	54,24	55,61
----	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*Sumber: Profil Dinas Pendidikan, 2016*

### **b. Kontribusi**

Kontribusi selain penyelenggaraan sekolah diselenggarakan juga pola belajar pendidikan luar sekolah melalui program paket A setara SD/MI, program Paket B setara SMP/MTs dan PLB.

Kontribusi menurut APK dan APM per tahun pelajaran menurut satuan/jenjang pendidikan:

#### 1. Tahun 2014/2015

- a. Kontribusi program Paket A setara SD APK 0,31 %, APM 0,08 %
- b. Kontribusi program Paket B setara SMP dan PLB APK 6,27 %, APM 2,25 %
- c. Siswa SD 29.238 orang terdapat sebanyak 21 orang siswa SD-LB
- d. Siswa SMP 7.308 orang terdapat sebanyak
- e. Siswa SMP Terbuka sebanyak 103 orang

#### 2. Tahun 2015/2016

- a. Kontribusi program Paket A setara SD APK 0,39 % APM 0,12 %
- b. Kontribusi program Paket B setara SMP dan PLB APK 6,32 % APM 3,21 %
- c. Siswa SD 30.152 orang terdapat sebanyak 27orang siswa SD-LB

d. Siswa SMP 7.890 orang terdapat sebanyak

e. Siswa SMP Terbuka sebanyak 124 orang

### c. Perbandingan dan Rasio Pendidikan

Perbandingan dan rasio pendidikan yang seimbang sangat mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu di sekolah, berdasarkan analisis data pendidikan :

#### 1. Perbandingan

a. Tahun 2014/2015

Perbandingan SD : SMP sebesar 1:5,64 (1 SMP terdapat sebanyak 5,64 SD), perbandingan terbesar terdapat di Kecamatan Pringsewu.

Perbandingan SMP :SM (SMA dan SMK) sebesar 1,95 (1,95 SMP terdapat 1 SMA/SMK), perbandingan terbesar terdapat di Kecamatan Pringsewu.

b. Tahun 2015/2016

Perbandingan SD : SMP sebesar 1:5,52 (1 SMP terdapat sebanyak 5,52 SD), perbandingan terbesar terdapat di Kecamatan Pringsewu.

Perbandingan SMP :SM (SMA dan SMK) sebesar 1,81 (1,81 SMP terdapat 1 SMA/SMK), perbandingan terbesar terdapat di Kecamatan Pringsewu.

#### 2. Rasio Pendidikan

Rasio pendidikan adalah perbandingan komponen internal di sekolah, dimana apabila rasio ini *relative* tidak seimbang (jauh dari kondisi ideal) sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar dan mengajar di sekolah.

**Tabel 7. Rasio Pendidikan Tahun Pelajaran 2014/2015**

No	Rasio Pendidikan	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
1.	Siswa/Sekolah	114	216	224	227
2.	Siswa/Kelas	24	44	41	33
3.	Siswa/Guru	14	16	21	10
4.	Kelas/Ruang Kelas	1,09	1,07	1,11	1,21
5.	Guru/Sekolah	6,63	5,02	4,31	5,06

Sumber: Profil Dinas Pendidikan, 2016

**Tabel 8. Rasio Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016**

6No	Rasio Pendidikan	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
1.	Siswa/Sekolah	110	214	222	225
2.	Siswa/Kelas	22	43	38	39
3.	Siswa/Guru	13	16	21	11
4.	Kelas/Ruang Kelas	1.11	0,99	1,08	1,00
5.	Guru/Sekolah	0,94	0,64	0,42	0,29

Sumber: Profil Dinas Pendidikan, 2016

Besarnya rasio siswa per sekolah membawa terhadap rasio lainnya, khususnya terhadap rata-rata siswa per kelas dan rata-rata kelas per ruang kelas (*Shift*), semakin besar rata-rata siswa per sekolah berarti makin besar pula rata-rata siswa per kelas dan sebaiknya semakin tinggi pula frekuensi pemakaian ruang kelas (pagi dan siang) hari, apabila pemakaian ruang kelas terjadi pagi dan siang hari untuk kelas yang berbeda ada kecenderungan pengurangan jam efektif belajar dari 45 menit pertama pelajaran yang disyaratkan setiap harinya.

a. Tahun 2013/2014

Rasio siswa persekolahan terbesar terdapat di Kecamatan Pringsewu dimana rasio siswa persekolah SMA adalah 322 orang, rata-rata siswa perkelas 38 dan *shift* 1,09

demikian juga pada jenjang pendidikan SMK rasio pendidikan di Kecamatan Pringsewu relative lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

b. Tahun 2014/2015

Rasio siswa persekolahan terbesar terdapat di Kecamatan Pringsewu dimana rasio siswa sekolah SMA adalah 325 orang, rata-rata siswa per kelas 38 dan *shift* 1,07 demikian juga pada jenjang pendidikan SMK rasio pendidikan di Kecamatan Pringsewu relative lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

c. Tahun 2015/2016

Rasio siswa persekolahan terbesar terdapat di Kecamatan Pringsewu dimana rasio siswa sekolah SMA adalah 331 orang, rata-rata siswa per kelas 38 dan *shift* 1,07 demikian juga pada jenjang pendidikan SMK rasio pendidikan di Kecamatan Pringsewu *relative* lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

**d. Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan dipengaruhi juga dengan tingkat pendidikan guru, sebab bagaimanapun juga jenjang pendidikan guru yang lebih baik akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir sikap dan tindakan guru, selanjutnya dengan tingkat pendidikan guru yang memadai ini diharapkan memberikan kontribusi peningkatan proses belajar mengajar di sekolah. Untuk jenjang pendidikan SD/MI tingkat pendidikan guru minimal D-II, SMP/MTs Minimal D-III dan AM minimal S-1 (keguruan).



## **B. Profil L-PAMAS**

### **1. Latar Belakang & Sejarah berdiri**

Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) berdiri pada tanggal 18 Juni 2007, secara umum dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia masyarakat yang masih *relative* lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang saling menghormati, mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain dari pada itu juga semakin menurunnya tingkat solidaritas, penghargaan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan antar warga masyarakat.

Secara khusus dilatarbelakangi adanya kebijakan *Childfund* (dulu CCF) tentang “*Bright Future dan Clustering*” bagi 5 lembaga mitra yang ada di Lampung, yaitu Lembaga Dana Atmaja (LDA) di Bandarlampung, Siwi Waluyo Jaya (SWJ) di Lampung Timur, Yayasan Bina Lestari Sejahtera, Yayasan Islam Miftahul Huda (YASMIDA) dan Yayasan Dwi bakti di Pringsewu.

Kemudian dari kondisi tersebut ada pada proses negosiasi dan pembahasan kebijakan tersebut di tingkat mitra mengalami kebuntuan (*deadlock*) sehingga munculah gagasan secara personal pengurus lembaga YASMIDA dan Yayasan Bina Lestari Sejahtera antara lain; Hi.MW.Muhajir, Hi.M.Khoeroni, Mustaqim Marzuki, Najarudin didukung oleh bapak Yudo Rusmono dan Tri Atmojo untuk membentuk

wadah baru berupa “Lembaga” dengan tujuan mewadahi dan melanjutkan kegiatan program kemitraan dengan *Childfund* Indonesia.

Gagasan tersebut diatas mulai diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang *draft* ketentuan dan formulasi kepengurusan. Pertemuan awal dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006 di kediaman bapak Najarudin, dari pertemuan tersebut memunculkan nama Lembaga Pemerhati Anak & Masyarakat (L-PAMAS) yang ide awalnya di kemukakan oleh bapak Tri Atmojo dan membagi tugas kepada peserta untuk mempersiapkan draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga.

Kemudian dilanjutkan pertemuan pemantapan rencana pendirian lembaga di kediaman bapak Hi.MW.Muhajir pada tanggal 15 Maret 2007 yang dihadiri oleh Hi.MW.Muhajir, Hi.M.Khoeroni, Drs. Indra Paramayogi, Harsono, Supartono, Sriyono, Tri Atmojo, Mustaqim Marzuki, Ahmad Asari, Najarudin, Robani dan Ig. Sugihartono yang menghasilkan kesepakatan pendirian lembaga LPAMAS dan juga menyepakati draft pendiri dan pengurus. Pada akhirnya secara legal terbitlah notaris No. 24 tanggal 18 Juni 2007 tentang pendirian LPAMAS dari Notaris Reza Berawi SH di Pringsewu.

## **2. Visi dan Misi**

### **Visi**

Terwujudnya kondisi masyarakat yang dinamis, sejahtera, mandiri berbasis pada nilai-nilai kehidupan yang luhur.

**Misi**

Mendorong terwujudnya lingkungan masyarakat yang penuh pengharapan dan penghargaan bagi kedamaian.

**3. Legalitas**

1. Akta Pendirian Notaris : M. Reza Berawi SH. Nomor 24 tanggal 18 Juni 2007
2. Akte Perubahan Anggaran Dasar Notaris: M. Reza Berawi SH. Nomor 03 tanggal 04 Januari 2008
3. Akte Perubahan Anggaran Dasar Notaris: M. Reza Berawi SH. Nomor 197 tanggal 17 Juni 2013
4. Surat Tanda Pendaftaran pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu nomor : 430/30/D.10/2013 tertanggal 07 Juni 2013.
5. Sertifikat Tanda Bukti Keberadaan Organisasi Masyarakat dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pringsewu nomor : 00-II.03-LT.11/0127/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
6. Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung dengan nomor : PEM-903/WPJ.28/KP.0303/2007 dan NPWP : 02.707.139.8-322.000
7. Surat Tanda Pendaftaran Yayasan/ Badan Sosial pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung Nomor : 465/034/Orsos/B.IV/2013
8. Surat Rekomendasi dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Propinsi Lampung No. 037/REK-LKSA/LKKS/V/2013

#### 4. Sekretariat :

Kantor L-PAMAS berada di Jln. Diponegoro No.95 Kelurahan Pringsewu Selatan  
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu – Lampung.Telp/Fax. 0729-22447  
Email :[lpamaspringsewu@gmail.com](mailto:lpamaspringsewu@gmail.com).

CP:Ahmad Asari – [081272003333/partoazhary@yahoo.com](mailto:081272003333/partoazhary@yahoo.com)

#### 5. Badan Pendiri

1. Hi. MW. Muhajir : Ketua
2. Hi. M. Khoeroni, S.Pd.I : Sekretaris
3. Sriono : Anggota
4. Supartono : Anggota
5. Sapuan : Anggota

#### 6. Badan Pengurus

- Ketua : Hi. M. Khotim, S.Pd, SE
- Sekretaris : Harsono
- Bendahara : Tuhono, S.Pd

#### 7. Bidang Organisasi

- Bidang Pendidikan : Supriyanto, ST.
- Bidang Kesejahteraan Sosial : Ahmad Asari, S.Pd.

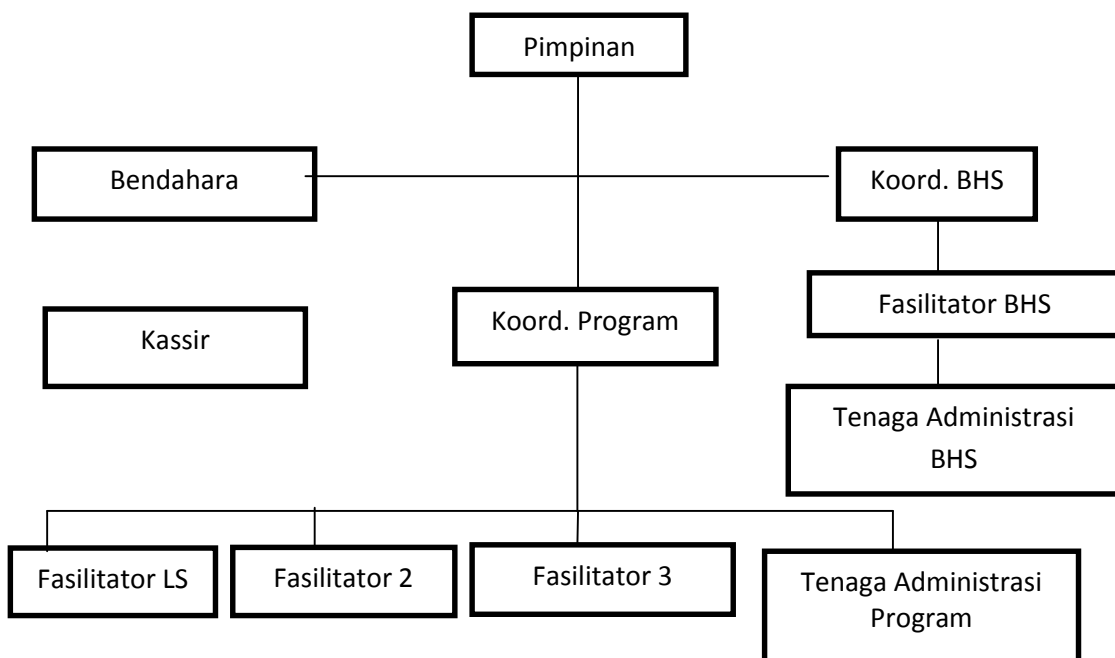
Bidang Usaha Ekonomi : Robani, S.Pd.I

Bidang Advokasi : Rizal Bahrul Mustofa

Bidang Penelitian dan Pengembangan : Eko Yulianto

## 8. Struktur Organisasi

**Gambar 2. Struktur Organisasi L-PAMAS**



## 9. Program Kerja Jangka Panjang

### a. Bidang Pendidikan

1. Membantu pemerintah dalam upaya melaksanakan program pendidikan wajib belajar yang ramah anak.
2. Membantu meningkatkan mutu pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**b. Bidang Program Kesehatan & Kesejahteraan Sosial**

1. Membantu pemerintah dalam upaya mengatasi dan mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

**c. Bidang Program Usaha Ekonomi**

1. Membuka usaha lembaga untuk memperkuat lembaga dari sisi financial.
2. Bersama masyarakat mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sentra permodalan usaha masyarakat.
3. Membuka peluang-peluang usaha ekonomi baik dibidang pertanian, peternakan dan perdagangan yang menggunakan potensi sumber daya lokal.

**d. Bidang Program Advokasi Anak dan Masyarakat**

Membantu mengatasi masalah-masalah yang ada dimasyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap anak, anak yang bermasalah dengan hokum dan masalah kekerasan dalam rumah tangga/KDRT.

**f. Bidang Program Penelitian dan Pengembangan**

1. Meneliti tentang keberhasilan dan atau kegagalan program yang dilaksanakan lembaga.
2. Meneliti tentang peluang menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
3. Memiliki pusat pendidikan ketrampilan bagi anak/remaja yang drop out sekolah

**g. Pengalaman organisasi**

1. Tahun 2007 – 2010

Bermitra dengan NGO international **Christian Children's Fund** dalam "Program Pemberdayaan Masyarakat yang Berorientasi pada Kepentingan Anak" di kabupaten Tanggamus dan Pringsewu. Kerja sama Program yang dilakukan dengan **Christian Children's Fund** adalah sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan.

Di bidang kesehatan Lpamas bekerja sama dengan Posyandu dan Puskesmas di desa dampingan masing-masing untuk memastikan pelayanan terhadap anak-anak balita dapat terpenuhi, dalam hal ini memberikan stimulan kegiatan seperti kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan juga memastikan kesehatan anak-anak dampingan melalui Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan setiap tahun sekali.

Bidang Sanitasi Lingkungan. Dalam kegiatan ini pula Lpamas memberikan bantuan stimulan untuk pembuatan Jamban Sehat dan Air Bersih (Sumur Gali), adapun bantuan stimulan yang diberikan berupa material seperti: Semen, pasir, batu bata, genting, closet, paralon.

b. Bidang Pendidikan.

Dalam bidang pendidikan ini Lpamas melakukan kegiatan-kegiatan yang ikut memastikan anak-anak dampingan dapat bersekolah dengan nyaman, seperti Bantuan Peralatan Sekolah dan Bantuan Biaya Pendidikan. Dalam usia pendidikan ini Lpamas bekerja sama dengan pemerintahan Desa dampingan memberikan ruang kegiatan dimana anak-anak usia pendidikan dapat memanfaatkan waktu bermainnya untuk

kegiatan-kegiatan yang positif, seperti kegiatan sanggar tari, kegiatan sanggar olahraga dan lain-lain.

#### c. Bidang Remaja

Dalam bidang ini Lpamas membuat kegiatan-kegiatan agar remaja-remaja mempunyai keterampilan hidup sebagai bekal anak-anak remaja dimasa yang akan datang seperti: pelatihan-pelatihan kerajinan, pelatihan otomotif dan pelatihan kursus komputer untuk anak-anak remaja. Di bidang ini juga kita memberi ruang kepada remaja untuk dapat berpartisipasi dalam wadah Forum Anak Desa, dimana kegiatan-kegiatannya untuk memberikan pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat tentang Hak-hak Anak.

#### d. Livelihood

Di bidang ini Lpamas memberikan stimulan bantuan berupa kegiatan Perguliran Ternak Kambing dan Sapi. Juga memberikan pelatihan-pelatihan penguatan kelompok masyarakat.

#### 2 Tahun 2009 – sekarang

Melalui unit kegiatan Koperasi Sumarta Pringsewu bekerja sama dengan *Habitat for Humanity Indonesia* melaksanakan "Program Pengembangan Perumahan Masyarakat" di kabupaten Pringsewu.



a. Tahun 2010 – sekarang

Bermitra dengan NGO International “*ChildFund International*” di Indonesia melaksanakan “Program Pemenuhan Hak Pendidikan Anak” di kabupaten Pringsewu. Bentuk kerjasama program yang dilakukan saat ini adalah:

1. Program Infant (0 – 5 tahun)

Dalam program ini bersama-sama masyarakat Lpamas melakukan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dari 5 desa dampingan Lpamas terdapat 8 PAUD yang di damping oleh Lpamas. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berupa:

- Pemberitan pelatihan-pelatihan kepada pengelola dan pembimbing PAUD
- Pertemuan Koordinasi rutin
- Pemberitan stimulant operasional Paud
- Pembangunan gedung Paud
- Kegiatan-kegiatan edukasi bagi anak-anak usia dini
- Kelompok bermain keluarga

2. Program Pendidikan (6 – 14 tahun)

Lpamas bekerja sama dengan dinas Pendidikan melakukan pengembangan Sekolah Adiwiyata dan Ramah Anak. Saat ini Lpamas telah mendampingi 4 sekolah yang berbasis Adiwita dan Ramah Anak.

Kegiatan-kegiatan lain dalam usia ini adalah Kelompok belajar, sanggar seni dan olahraga

### 3. Program Youth ( 15 – 24 tahun)

Dalam program ini Lpamas bekerja sama dengan Pemerintah daerah (Badan KBPP) untuk bersama-sama mendampingi Forum Anak Pringsewu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum anak Pringsewu adalah Pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja, Seminar HIV AIDS, Pelatihan Jurnalistik sampai dengan penerbitan Buletin Forum Anak. Sedangkan untuk menyiapkan masa depan anak-anak remaja Lpamas juga memberikan Pelatihan-pelatihan keterampilan seperti: Pelatihan Otomotif, Pelatihan Kerajinan Bambu, Pelatihan pemanfaatan Limbah Rumah tangga, Pelatihan Komputer.

### 4. *Disaster Risk Reduction (DRR)*

Bersama masyarakat Lpamas melakukan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan-pelatihan Pengurangan Resiko Bencana berbasis Masyarakat, melakukan Kajian Resiko Bencana berbasis Masyarakat sampai dengan Rencana Kontijensi di masing-masing desa dampingan. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang selalu siaga terhadap datangnya bencana bersama 2 desa dampingan Lpamas membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang mana semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lpamas sejalan dengan program yang ada di pemerintah daerah.

## **C. Gambaran Umum Sekolah Ramah Anak**

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dapat diketahui bahwa sekolah Ramah Anak adalah

satuan pendidikan aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Berikut hal-hal mengenai sekolah ramah anak:

### **1. Prinsip Sekolah Ramah Anak**

Pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orangtua.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.

- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

## **2. Tahapan Sekolah Ramah Anak**

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan sekolah ramah anak harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:

- a. Persiapan
  - 1. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota.
  - 2. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak.
  - 3. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orangtua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan.
  - 4. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA.

5. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

b. Perencanaan

Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

c. Pelaksanaan

Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

### 3. Landasan Hukum

a. Ketentuan Internasional

1. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.
2. Konvensi Hak Anak oleh PBB tahun 1989.
3. Deklarasi *Dakar Education For All*(EFA) tahun 2000.
4. Deklarasi *MilleniumDevelopment Goals* (MDGs)

5. Deklarasi *World Fitfor Childrentahun* 2002.
- b. Ketentuan Nasional
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang SistemPendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International CovenantonEconomic, SocialandCultural Rights*(Kovenan Internasionaltentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
  4. Undang-Undang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang KeamananMutu dan Gizi Pangan.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pola Kemitraan antara aktor yang bermitra dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola kemitraan antara pemerintah yang terdiri dari dinas pendidikan, dinas kesehatan dan badan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pringsewu dengan *civil society* yang terdiri dari *Childfund International* Jakarta, L-PAMAS dan tokoh masyarakat bersama dengan SD 2 Karang Sari dan SD 3 Panggungrejo adalah menggunakan pola kemitraan mutualistik. Hal ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang terdapat pada kemitraan mutualistik yang sama dengan apa yang ada pada kemitraan ini, yakni hanya berbentuk jaringan kerjasama untuk mencapai tujuan secara lebih optimal dan untuk saling memberikan manfaat yang lebih.

Adanya kemitraan perencanaan antar lintas aktor, yang kemudian dituangkan dalam diskusi antar sekolah yang kemudian ditawarkan pada pihak dinas pemerintahan yang kemudian tertarik untuk bermitra, tidak adanya legalitas kemitraan, adanya perlindungan kepentingan dan hak pihak ketiga, adanya dukungan dan kontrol fasilitas yang memadai untuk menjalankan program sekolah ramah anak, adanya koordinasi internal antara aktor adanya lembaga yang



memadai yaitu tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menjalankan komunikasi yang baik dalam Program Sekolah Ramah Anak.

**2. Kendala-kendala yang dihadapi antara aktor yang bermitra dalam pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak**

Kendala yang menghambat kemitraan ini ialah:

- a. Mengenai Pola pikir pihak sekolah untuk menerima program Sekolah Ramah Anak.
- b. Kurangnya sumber pendanaan secara berkelanjutan dalam Sekolah Ramah Anak dalam peningkatan fasilitas dan inovasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak
- c. Belum adanya legalitas kemitraan antar actor dan belum dipikirkan baik itu oleh masing-masing setiap *civil society* dengan pemerintah dan pihak sekolah SD Negeri 2 Karang Sari dan SD Negeri 3 Panggungrejo.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Penerapan program sekolah ramah anak di dua sekolah ini tetap diterapkan dan selalu di pantau keberlanjutannya
2. Pertemuan koordinasi antara pihak *civil society* dan dinas pemerintah sebaiknya sering dilakukan agar hubungan komunikasi dan kepentingan pencapaian sekolah ramah anak dan supaya tidak mengganggu jalannya kemitraan terutama dalam pencarian dana bersama.
3. Program sekolah ramah di masing-masing sekolah Kabupaten Pringsewu semakin di tambah dan tidak hanya di dua sekolah saja.
4. Sebaiknya legalitas kemitraan antara *civil society* dengan dinas pemerintah dan pihak sekolah segera dibuat agar kemitraan ini jelas landasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadiwijoyo, Surya Sakti. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Jakarta Pustaka LP3ES.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mansour, Fakhri. 2004. *Masyarakat Sipil untuk transformasi sosial pengelolaan ideology LSM Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Promosi Kesehatan teori & aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahardjo, Dawan. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah & Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Santosa, Pandji. 2008. *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Thoha, Miftah. 1999. *Administrasi Negara, demokrasi dan masyarakat madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

### **Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah**

Kamil, Mustofa. 2006. Strategi Kemitraan dalam Membangun PNF melalui pemberdayaan Masyarakat (Model, keunggulan dan kelemahan). Bandung: Seminar dan lokakarya Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal dalam Era Otonomi Daerah

Melyanti, Imelda Merry. 2014. Pola Kemitraan Pemerintah, *Civil Society*, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Public. Unair Vol.2 No.1

Herliani, Anggi. 2016. Kemitraan antara lembaga pemerhati anak dan masyarakat (LPAMAS) dan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak. Skripsi. Universitas Lampung

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

### **Website**

<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4710> yang diakses pada tanggal 01 November 2016 pukul 11.20